

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA****(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Oktober 2023/Khusus - Awal Menjabat)**

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
UNIT KERJA : KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **HAMDAN**
2. Jabatan : **KETUA**
3. NHK : **441165**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp.** **601.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 117 m2/36 m2 di KAB / KOTA KAMPAR, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 104 m2/80 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000
3. Tanah Seluas 20000 m2 di KAB / KOTA PASAMAN BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000
4. Tanah Seluas 19829 m2 di KAB / KOTA PASAMAN BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 172.000.000
5. Tanah Seluas 2650 m2 di KAB / KOTA PASAMAN BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 26.000.000
6. Tanah Seluas 249.6 m2 di KAB / KOTA PASAMAN BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 23.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **173.500.000**

1. MOTOR, HONDA BEAT MATIC Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 10.500.000
2. MOBIL, DAIHATSU TERIOS LOW SUV Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 163.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **10.000.000****D. SURAT BERHARGA** **Rp.** **----****E. KAS DAN SETARA KAS** **Rp.** **194.217.760****F. HARTA LAINNYA** **Rp.** **----****Sub Total** **Rp.** **978.717.760**



III. HUTANG

Rp. 111.366.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 867.351.760

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.